

PEDOMAN UMUM

Pengarusutamaan

GENDER

dalam
Penyusunan

Rencana Aksi
Pembangunan
Pertanian



DEPARTEMEN PERTANIAN 2007



2.611 ✓

630

Bir

p.

Smpt 4.

PEDOMAN UMUM

bib 4

Pengarusutamaan

GENDER

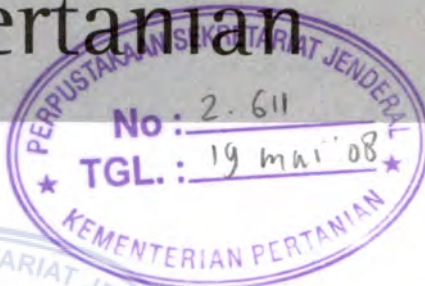
dalam
Penyusunan

Rencana Aksi
Pembangunan
Pertanian

No: 2.611

TGL.: 19 Mei '08

DEPARTEMEN PERTANIAN 2007





**PEDOMAN UMUM
PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN PERTANIAN**

Edisi Kelima

Juni 2007

**BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN**

Jakarta, Juni 2007

ISBN: 979-582-005-2

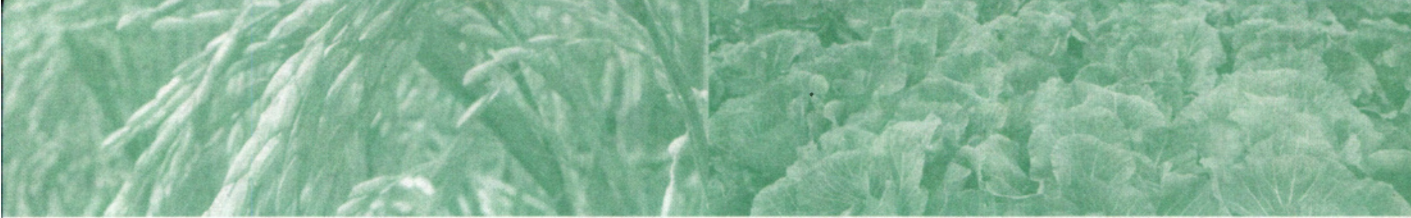




KATA PENGANTAR

STRATEGI PUG pada dasarnya meletakkan aspek sosial budaya sebagai salah satu aspek penting dalam proses pembangunan karena meletakkan manusia sebagai isu sentral dalam kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan visi Departemen Pertanian yang mengutamakan keberpihakan pada petani melalui pembangunan pertanian yang berkelanjutan, maka semua pihak yang terlibat perlu memahami strategi PUG.

Guna memberikan pemahaman tentang implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan bagi para perencana dan pelaksana pembangunan pertanian, dipandang perlu adanya buku Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Pertanian. Buku ini memuat penjelasan umum tentang proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan pertanian dengan menggunakan instrumen Alur Kerja Analisis Gender (AKAG/*Gender Analysis Pathway*). Buku ini sekaligus merupakan pelengkap dari Buku Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian dan berisikan contoh implementasi strategi PUG pada setiap Eselon I lingkup Departemen Pertanian.



Bagi seluruh aparat Departemen Pertanian dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan agar sasaran kebijakan/program/kegiatan pembangunan pertanian dapat terwujud melalui rencana tindak dan kegiatan operasional yang lebih tepat sesuai dengan potensi, pengalaman, kebutuhan, dan aspirasi petani/pelaku usaha di bidang pertanian.

Jakarta, Juni 2007

Sekretaris Jenderal

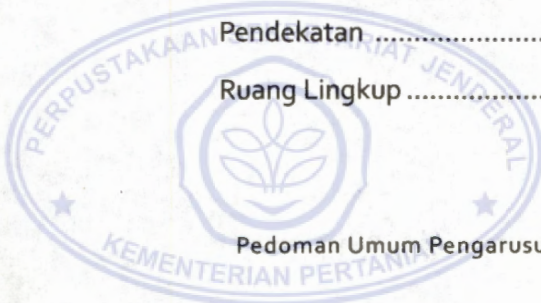


Dr. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Sp.I



DAFTAR ISI

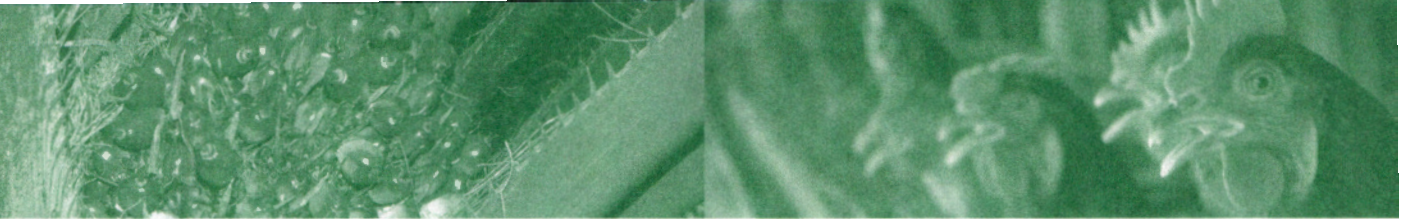
KATA PENGANTAR	iii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Tujuan dan Keluaran.....	3
Tujuan	3
Keluaran.....	3
Manfaat dan Dampak	4
Manfaat	4
Dampak	4
Strategi dan Pendekatan	4
Strategi	4
Pendekatan	5
Ruang Lingkup	5



METODE ALUR KERJA ANALISIS GENDER & ANALISIS

KEBIJAKAN UNTUK RENCANA AKSI	7
Pengertian dan Prosedur	8
Pengertian	8
Prosedur	10
Gender Analysis Pathway (GAP)	11
Pelaksanaan Metode GAP	12
- TAHAP I: Analisis Kebijakan yang Responsif Gender	12
- TAHAP II: Formulasi Kebijakan Responsif Gender	15
- TAHAP III: Rencana Aksi yang Responsif Gender	16
Penerapan Alur Kerja Analisis Gender dan Analisis Kebijakan untuk Rencana Aksi Pada Beberapa Unit Kerja Lingkup Departemen Pertanian	17
DAFTAR PUSTAKA	35
TIM PENYUSUN	36





Salah satu pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia adalah pembangunan yang berwawasan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara yang mendukung penuh agenda pembangunan berwawasan gender yang ditetapkan dalam Deklarasi Beijing 1995. Pembangunan berwawasan gender berarti pembangunan yang memperhatikan peran, kebutuhan, dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara setara dalam proses pembangunan.

Salah satu tantangan dalam pembangunan berwawasan gender adalah bagaimana memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas perempuan dan laki-laki dalam memahami dan menggunakan hak-hak mereka.

Salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas tersebut adalah dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai hak-hak perempuan dan laki-laki.

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan dalam pembangunan berwawasan gender adalah bagaimana memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas perempuan dan laki-laki dalam memahami dan menggunakan hak-hak mereka. Salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas tersebut adalah dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai hak-hak perempuan dan laki-laki.

Salah satu tantangan dalam pembangunan berwawasan gender adalah bagaimana memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Salah satu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas perempuan dan laki-laki dalam memahami dan menggunakan hak-hak mereka.

Salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas tersebut adalah dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses mengenai hak-hak perempuan dan laki-laki.





Latar Belakang

Paradigma pembangunan pertanian yang berorientasi pada produksi di masa yang lalu dan tidak dilaksanakan bersamaan dengan orientasi pada sumberdaya manusianya telah membuahkan pembangunan pertanian yang tidak berkelanjutan. Hal ini terbukti dari masih tingginya rumahtangga miskin di perdesaan meskipun peningkatan target produksi mampu dicapai.

Angka kemiskinan di Indonesia meningkat dari 36,2 juta orang pada tahun 2004 menjadi 39,1 juta orang di tahun 2006, dimana 24,8 juta diantaranya tinggal di perdesaan. Di perdesaan, kemiskinan terkait langsung dengan sempitnya lahan produksi yang dimiliki. Hasil Sensus Pertanian mencatat adanya peningkatan jumlah rumah tangga pertanian (RTP) dari 20,8 juta pada tahun 1993 menjadi sekitar 25,4 juta di tahun 2003. Jumlah petani yang hanya menguasai lahan 0,5 hektar atau kurang juga meningkat dari 10,8 juta RTP di tahun 1993 menjadi 13,7 juta RTP di tahun 2003. Apabila ditinjau berdasarkan jenis kelamin kepala rumahtangganya, pada periode 1996-1999 BPS mencatat di perdesaan terdapat peningkatan rumahtangga miskin yang dikepalai perempuan (PKRT), yaitu dari 0,47 juta rumahtangga menjadi 0,61 juta rumatangga (Badan Pusat Statistik, 2001).

Dari aspek sosial budaya, disadari bahwa pada kenyataannya aspirasi, pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian bersifat khas antara laki-laki dan perempuan dan antara kelompok usia muda, dewasa dan usia lanjut. Oleh karena itu, apabila orientasi paradigma pembangunan pertanian juga difokuskan pada sumberdaya manusia, maka strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu pilihannya.



Penerapan strategi PUG dalam pembangunan pertanian dapat dimulai dengan menggunakan instrument Alur Kerja Analisis Gender (AKAG/Gender Analysis Pathway). Sebagai sebuah instrument, AKAG dapat menilai implikasi dari peraturan, kebijakan/program/kegiatan pembangunan pertanian terhadap pelaku usaha di bidang pertanian baik laki-laki maupun perempuan, sehingga selanjutnya dapat dilakukan perumusan kembali peraturan, kebijakan/program/kegiatan yang lebih peka terhadap aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan yang dihadapi oleh laki-laki maupun perempuan di sektor pertanian.

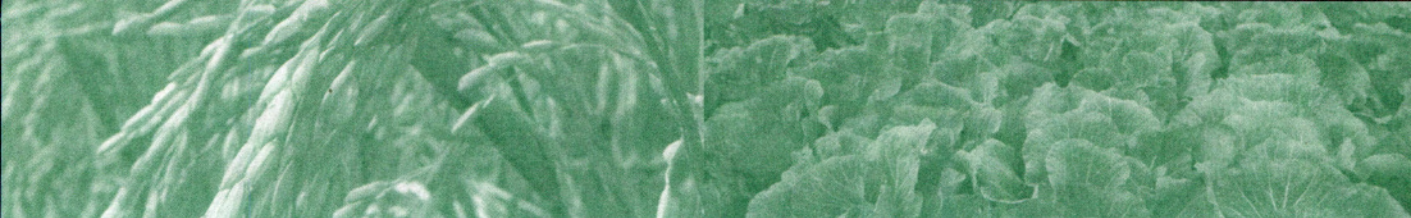
Tujuan dan Keluaran

Tujuan

Pedoman PUG dalam pembangunan pertanian ini bertujuan untuk menginkorporasikan potensi, masalah, kebutuhan, pengalaman dan kepentingan pelaku pembangunan pertanian, baik laki-laki maupun perempuan, ke dalam siklus program/kegiatan pembangunan pertanian, mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Keluaran

Tersusunnya rumusan Rencana Pembangunan Pertanian Tahunan yang responsif terhadap potensi, masalah, kebutuhan, pengalaman dan kepentingan pelaku pembangunan pertanian, baik laki-laki maupun perempuan, ke dalam siklus program/kegiatan pembangunan pertanian, mulai dari proses perencanaan, implementasi, monitoring sampai dengan evaluasi dan pelaporan.



Manfaat dan Dampak

Manfaat

Memastikan bahwa setiap pelaku pembangunan pertanian, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses, menjadi pengambil keputusan, berpartisipasi dalam program/kegiatan pembangunan pertanian, serta menjadi penerima manfaat pembangunan pertanian

Dampak

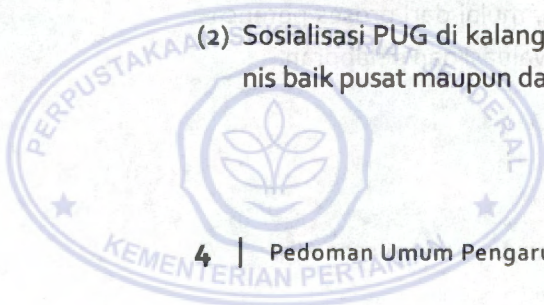
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pembangunan pertanian serta menjamin akuntabilitas dan keberlanjutan program/kegiatan pembangunan pertanian.

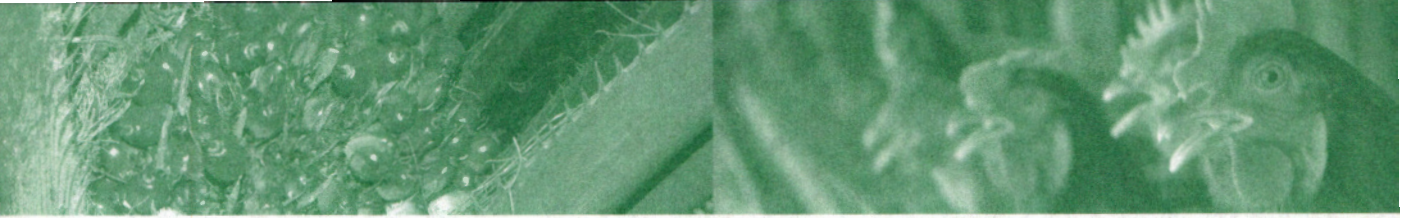
Strategi dan Pendekatan

Strategi

Untuk mengakselerasi penerapan PUG dalam pembangunan pertanian dilakukan melalui strategi yang mencakup:

- (1) Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) di tingkat Departemen Pertanian dan pada setiap Eselon I lingkup Departemen Pertanian.
- (2) Sosialisasi PUG di kalangan penentu kebijakan, perencana, pelaksana teknis baik pusat maupun daerah.



- 
- (3) Penyusunan dan penerbitan berbagai media informasi yang mencakup informasi mengenai tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, PUG dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian, PUG dalam Program/ Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian.

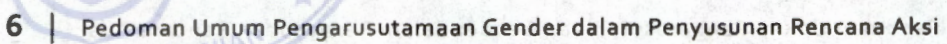
Pendekatan

Untuk melaksanakan PUG dalam Pembangunan Pertanian ini digunakan pendekatan Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) dan *Policy Outlook for Action Plan* (POP), yang didalamnya meliputi Teknik Analisis Gender (TAG).

Ruang Lingkup

Ruang lingkup PUG dalam pedoman umum ini mencakup semua tahapan mulai dari proses identifikasi potensi dan masalah berbasis gender, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan PUG dalam Pembangunan Pertanian.





METODE ALUR KERJA ANALISIS GENDER & ANALISIS KEBIJAKAN UNTUK RENCANA AKSI



Pengertian dan Prosedur

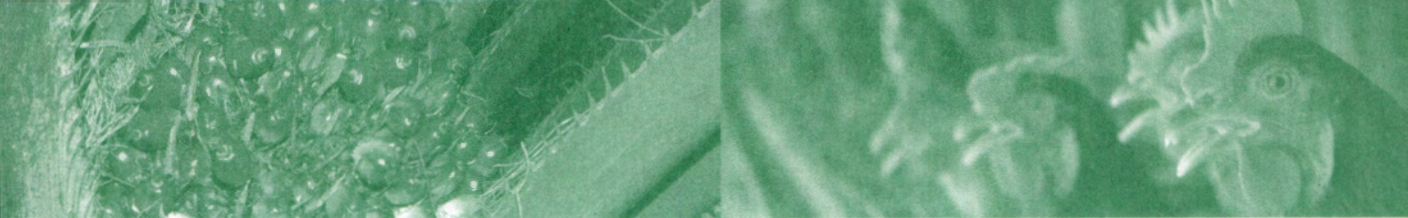
Pengertian

Alur Kerja Analisis Gender atau Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan alat analisis yang dikembangkan oleh BAPPENAS RI bersama Tim Konsultan Nasional untuk PUG dalam Program Pembangunan (Rosalin dkk., 2001) yang dapat digunakan oleh (terutama) para perencana dalam melakukan proses perencanaan pembangunan yang responsif gender.

Metode GAP adalah salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan dan/atau perencanaan program pembangunan. Dengan GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*) serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Dikemukakan oleh Rosalin dkk (2001), bahwa selama ini kita mengenal Perencanaan Pembangunan pada beberapa tingkatan, sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat nasional direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro nasional, berupa penetapan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
- (2) Pada tingkat propinsi, direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro regional, yang berupa penetapan tujuan dan sasaran pembangunan propinsi;
- (3) Pada tingkat kabupaten/kota, direncanakan/dirumuskan kebijakan makro dan mikro daerah, yang berupa penetapan tujuan dan sasaran pembangunan kabupaten/kota.

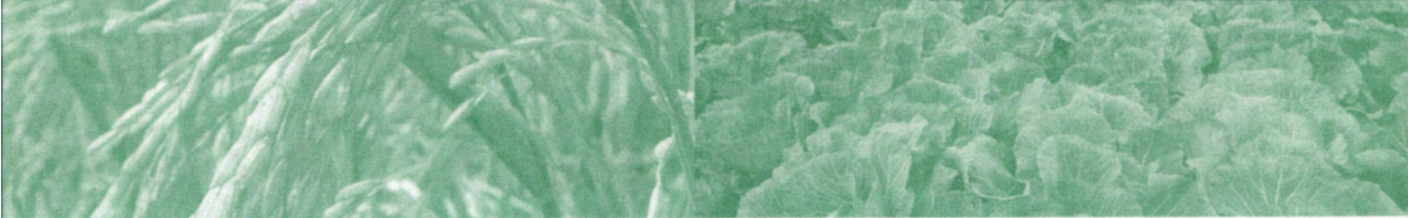


Berdasarkan kebijakan pada masing-masing tingkatan administrasi tersebut, dilakukan perencanaan program untuk menyusun rencana program (termasuk proyek dan kegiatan di dalamnya) jangka menengah (setiap lima tahun) atau jangka pendek (setiap tahun) yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah (propinsi, kabupaten/kota, termasuk desa). **Permasalahannya adalah bahwa perencanaan yang dilakukan selama ini belum tergolong perencanaan yang responsif gender.**

Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan perencanaan program. Dalam melakukan perencanaan yang responsif gender, para perencana perlu melakukan analisis gender pada semua kebijakan dan program pembangunan.

Perencanaan yang Responsif Gender diperlukan untuk beberapa alasan. **Pertama** untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih mantap, berkesinambungan, dan mencapai tingkat kemungkinan keberhasilan yang tinggi, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. **Kedua**, perencanaan yang responsif gender dilakukan dalam upaya untuk memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di berbagai bidang pembangunan, termasuk pendidikan. Dengan tujuan perencanaan yang responsif gender adalah tersusunnya rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang/ sektor pembangunan dan di setiap lingkup pemerintahan.

Untuk itu, melakukan analisis Gender atau tepatnya teknik analisis gender diartikan sebagai pengujian secara sistematis terhadap peranan-peranan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang memusatkan perhatiannya pada ketidakseimbangan kekuasaan, kesejahteraan dan beban kerja antara laki-laki dan perempuan di semua masyarakat. Istilah ini diterapkan terhadap



proses pembangunan, khususnya untuk melihat bagaimana kebijaksanaan pada program pembangunan mempunyai dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Surbakti dkk (2001) mengemukakan bahwa **analisis gender merupakan langkah awal penyusunan tujuan pembangunan yang responsif gender.**

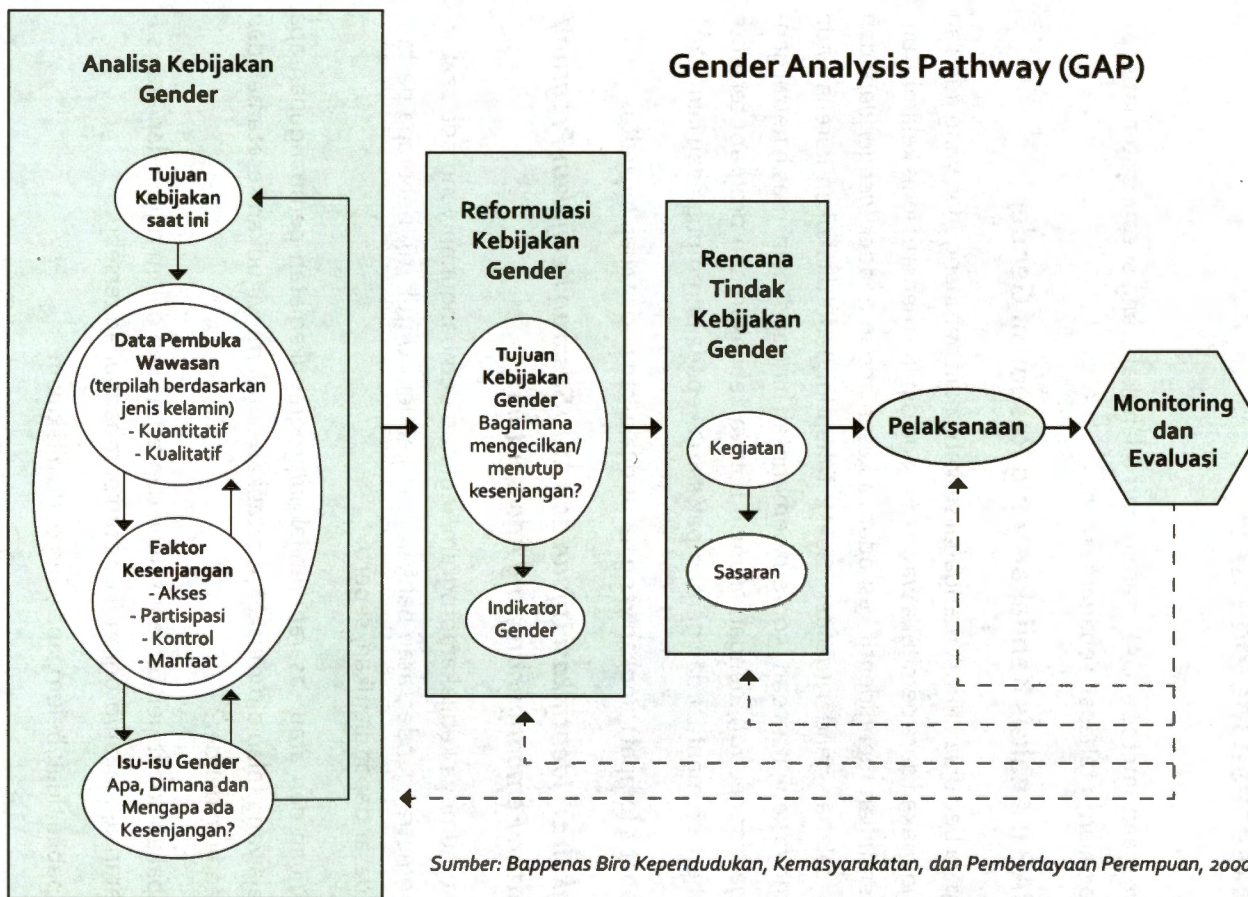
Prosedur

Analisis gender dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) faktor utama guna mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan gender. Keempat faktor tersebut adalah:

- (1) Faktor akses. Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan
- (2) Faktor kontrol. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumberdaya pembangunan?
- (3) Faktor partisipasi. Bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam program-program pembangunan?
- (4) Faktor manfaat. Apakah perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan?

Alur kerja Analisa Gender sebagaimana dikembangkan oleh Bappenas secara sistematis digambarkan sebagai berikut:





Pelaksanaan Metode GAP

Pelaksanaan metode GAP terdiri dari 8 langkah yang secara sistematis ter-cakup dalam 3 tahapan sebagai berikut.

TAHAP I: Analisis Kebijakan yang Responsif Gender

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, un-tuk kemudian mengidentifikasi adanya kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*). Tahap ini perlu dilakukan karena pada umumnya kebijakan dan program pemerintah hingga saat ini masih netral gen-der (*gender neutral*), dengan asumsi bahwa kebijakan dan program tersebut memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki.

Terdapat 4 (empat) langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu:

Langkah 1: Identifikasi Tujuan dan Atau Sasaran Kebijakan/Program/ Kegiatan Pembangunan yang Ada Saat Ini

Pada umumnya kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada saat ini adalah netral gender, atau bahkan bias gender. Untuk itu, beberapa pertan-yaan dasar dapat diajukan, seperti:

- (1) Tujuan dan atau sasaran kebijakan/program/kegiatan pembangunan apa saja yang telah dirumuskan/ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender?
- (2) Apakah komitmen tersebut telah diintegrasikan dalam tujuan dan atau sa-saran kebijakan/program/kegiatan pembangunan tersebut?
- (3) Apabila tidak/belum, apa yang perlu dilakukan?

Langkah 2: Sajikan Data Kuantitatif dan atau Kualitatif yang Terpilah Menurut Jenis Kelamin sebagai Data Pembuka Wawasan (Eye-Opener Data)

- (1) Data kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada saat ini memberikan dampak yang berbeda kepada perempuan dan laki-laki, serta sekaligus dapat digunakan untuk menentukan perspektif/dimensi gender dari kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dirumuskan.
- (2) Data ini harus dipilah menurut jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) sehingga para perencana dapat memahami adanya perbedaan pengalaman, aspirasi, permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki. Di samping itu, data kualitatif dapat pula digunakan untuk melihat perbedaan yang ada antara perempuan dan laki-laki.

Pada langkah ini pertanyaan dasar yang dapat, diajukan, adalah: apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki?

Langkah 3: Analisis Sumber Terjadinya dan atau Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan Gender (Gender Gap)

Untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender, digunakan 4 (empat) faktor utama, yaitu: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang diperoleh melalui teknik analisis gender. Beberapa pertanyaan mendasar yang dapat membantu mengungkapkan adanya kesenjangan gender, adalah:

- (1) Apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan?
- (2) Siapa yang menguasai (memiliki kontrol) sumberdaya pembangunan tersebut?

- 
- (3) Bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan?
 - (4) Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan atau sumber-sumberdaya pembangunan yang ada?

Berdasarkan data pembuka wawasan, nampak bahwa terdapat kesenjangan dalam angka partisipasi pendidikan yang antara lain dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat dan ekonomi keluarga yang lebih menganggap pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting daripada untuk anak perempuan.

Langkah 4: Identifikasi Masalah-Masalah Gender (Gender Issues)

Pada tahap ini, para perencana dapat mengidentifikasi masalah-masalah gender, berdasarkan empat faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender sebagaimana dihasilkan pada Langkah 3 di atas.

Terdapat beberapa pertanyaan dasar yang dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah gender, diantaranya adalah:

- (1) Masalah-masalah gender apakah yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender?
- (2) Dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki?
- (3) Apakah kesenjangan terjadi di wilayah publik dan ataukah terjadi di wilayah domestik?. Mengapa terjadi kesenjangan gender tersebut?
- (4) Apakah kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ada mempersempit kesenjangan gender tersebut, tetap atau justru memperlebar kesenjangan tersebut?
- (5) Apakah akar permasalahannya? Bagaimana mengatasinya?

TAHAP II: Formulasi Kebijakan Responsif Gender

Tahap kedua ini terbagi menjadi 2 (dua) langkah, yaitu:

Langkah 5: Rumuskan Kembali kebijakan/program/kegiatan Pembangunan yang Responsif Gender

Pada langkah kelima ini para perencana perlu merumuskan kembali kebijakan/program/kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis gender yang dilakukan Langkah 1-4, sehingga menghasilkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Beberapa pertanyaan berikut diharapkan dapat membantu mengarahkan perumusan kembali kebijakan/program/kegiatan pembangunan agar responsif gender.

- (1) Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada?
- (2) Bagaimana pemerintah dapat memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender tersebut?
- (3) Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut?
- (4) Alternatif kebijakan/program/kegiatan pembangunan apa yang harus dikembangkan untuk memperkecil/ menghilangkan kesenjangan gender dan masalah-masalah gender yang telah diuraikan pada Langkah 3 dan Langkah 4 di atas?
- (5) Rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang bagaimana yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender pada kelompok sasaran?

Langkah 6: Identifikasi Indikator Gender (Gender Indicator)

Pada langkah ini para perencana perlu mengidentifikasi indikator gender dari setiap kebijakan/program/kegiatan pembangunan pada Langkah 5.

Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu mengarahkan, seperti:

- a) Indikator kuantitatif dan atau kualitatif apa saja yang dapat diidentifikasi untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender?
- b) Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan sudah berkurang, tetap, atau bahkan melebar?
- c) Apa ukuran keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender?

Tahap III: Rencana Aksi yang Responsif Gender

Dengan merujuk hasil pada Tahap II di atas, pada tahap ketiga ini dilakukan 2 (dua) langkah, yaitu:

Langkah 7: Penyusunan Rencana Aksi

Berdasarkan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender perlu disusun rencana aksi yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun harus sesuai dengan tujuan kebijakan kesetaraan dan keadilan gender yang telah diidentifikasi pada Langkah 5 di atas.



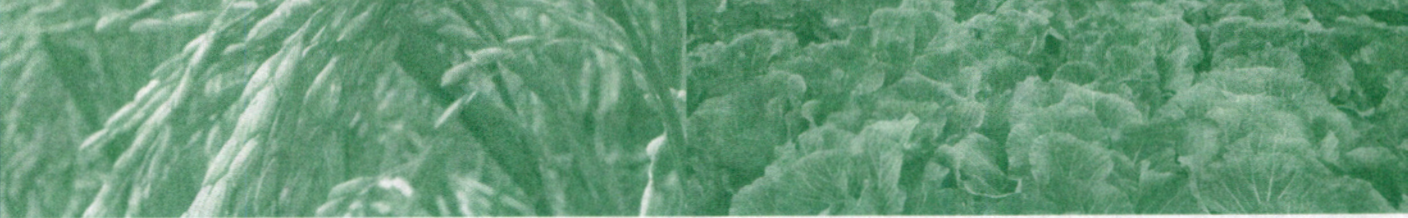
Langkah 8: Identifikasi Sasaran-Sasaran (Kuantitatif Dan Atau Kualitatif Untuk Setiap Rencana Aksi)

Sasaran-sasaran apa (kuantitatif dan/atau kualitatif) yang perlu dirumuskan untuk setiap rencana aksi yang telah disusun pada Langkah 7 tersebut di atas? Pastikan bahwa dengan melakukan rencana aksi tersebut, maka kesenjangan gender akan berkurang atau hilang.

Penerapan Alur Kerja Analisis Gender Dan Analisis Kebijakan Untuk Rencana Aksi Pada Beberapa Unit Kerja Lingkup Departemen Pertanian

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Tahun 2004 yang telah disusun oleh unit kerja eselon 1 lingkup Departemen Pertanian, berikut ini disajikan beberapa contoh penerapan metode Alur Kerja Analisis Gender dan Analisis Kebijakan untuk Rencana Aksi pada unit kerja yang bersangkutan. Adanya keterbatasan data yang terpilah menurut jenis kelamin, menjadikan data pembuka wawasan pada beberapa matriks terlampir belum lengkap. Dengan demikian, diharapkan setiap unit kerja dapat menyempurnakan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan.





1. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah definisi dari kata-kata yang digunakan dalam dokumen ini:

1.1. **Gender** adalah konsep yang menunjukkan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, tanggung jawab, kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya.

2. **Perencanaan Aksi** adalah proses merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

3. **Kepaingunkungan** adalah kondisi lingkungan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

4. **Partisipasi** adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

5. **Transparansi** adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

6. **Akuntabilitas** adalah tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

7. **Keberlanjutan** adalah kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang.

8. **Keadilan** adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang.



CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA DITJEN TANAMAN PANGAN

Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Renformulasi Kebijakan/ Program/Keg.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/ Keluaran
Meningkatnya produktivitas rata-rata tiga persen per tahun. Meningkatnya pendapatan petani antara 5-10 persen per tahun (Proram PP 2001-2004 Hal 35-36)	Rataan penguasaan lahan perempuan kepala rumah tangga (PKRT) lebih sempit (0,7 Ha) dibandingkan LKRT (laki-laki kepala rumah tangga) yaitu 1 Ha. Namun, produktivitas lahan PKRT (79,5%) > LKRT yaitu sebesar 69,9% (BPS, 2001). Berbagai hasil penelitian (Saliem dkk., 1996; Saliem, 1995; Saenong dan Akib, 1994) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam agribisnis, terutama dalam kegiatan budidaya, pasca panen dan pemasaran hasil sangat signifikan. Selain itu, kontribusi perempuan terhadap total pendapatan rumah tangga sekitar 40% (Galib dan Ramli, 1990; Saliem dkk., 1996)	Akses: Nor-ma masyarakat yang bersifat patriarkhat di sebagian besar daerah telah memposisikan kegiatan pembangunan di wilayah publik yang merupakan tanggung jawab laki-laki. Hal ini telah berdampak terhadap tidak/ kurangnya akses pelaku agribisnis perempuan terhadap permodalan, sarana & prasarana agribisnis serta informasi pasar. Kontrol: Walaupun peran dan kontribusi pelaku pembangunan pertanian perempuan dalam agribisnis dan pendapatan rumah tangga cukup signifikan, tetapi perempuan sering kurang/tidak diperhitungkan dalam desain program/proyek/ kegiatan pengembangan agribisnis.	a) Masih rendahnya tingkat kesadaran penentu kebijakan dan fasilitator program/kegiatan pembangunan bahwa pelaku agribisnis terdiri dari laki-laki dan perempuan, sehingga pelaku agribisnis perempuan tidak/kurang akses terhadap kebutuhan fasilitasi pengembangan seperti permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar. b) Belum tersedianya data mengenai profil pengguna/ pemanfaat program/kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan yang terpilih menurut jenis kelamin dan spesifik lokasi.	Peningkatan akses pelaku agribisnis terhadap permodalan, sarana dan prasarana agribisnis serta informasi pasar.	Meningkatnya jumlah dan pelayanan lembaga penyedia input pertanian seperti permodalan, jasa asing dan saprodi. Meningkatnya jumlah penentu kebijakan, perencana dan penyelenggara program/ kegiatan yang mempunyai kesadaran gender dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan. Tersedianya data secara spesifik mengenai kebutuhan fasilitasi pengembangan seperti permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar dari pelaku agribisnis laki-laki dan perempuan	Fasilitasi, koordinasi forum kerja sama sosialisasi/gerakan kemitraan usaha yang berperspektif gender. Sosialisasi dan advokasi dalam bentuk lokakarya, seminar, <i>round-table meeting</i> dll., dan produksi media informasi mengenai inkorporasi PUG dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan. Analisis gender dan karakterisasi profil potensi, pengalaman, masalah, dan kebutuhan fasilitasi dari partisipan/pemanfaat program/ kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan	Meningkatnya akses pelaku agribisnis tanaman pangan laki-laki dan perempuan terhadap fasilitasi pengembangan agribisnis seperti permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar.



Sasaran Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Renformulasi Kebijakan/ Program/Keg.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/ Keluaran
	Persentase rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga perempuan (PKRT) dengan lapangan usaha pertanian di perde-saan pada tahun 1999 (75,2%) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga laki-laki (LKRT) sebesar 74,4% (Susenas,BPS,1999). Hal ini mengindikasikan tingkat kebutuhan fasilitasi yang sama antara PKRT dan LKRT.	Partisipasi dan manfaat: Pendekatan rumah tangga yg banyak digunakan dalam program/proyek/ kegiatan pembangunan sering memposisikan kepala rumah tangga, yang seba-gian besar laki-laki, sebagai partisipan/ pemanfaat program /kegiatan pembangunan, walaupun anggota keluarga perempuan mempunyai peran dan atau kontrol yang besar pada tujuan/fokus program/kegiatan pembangunan tersebut.	c) Program/kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan selama ini masih kurang/belum berorientasi pada potensi, masalah, kebutuhan, penga-laman dan kepen-tingan spesifik pe-laku agribisnis, yaitu laki-laki dan perempuan,		Meningkatnya jumlah program/ kegiatan pe-ngembangan agri-bisnis tanaman pa-ngan yang meng-inkor-porasi PUG dalam desain program/kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan,	Penyelenggaraan program/kegiatan pengembangan agribisnis tanam an pangan yang sensitif gender yang memfasilitasi peningkatan akses pelaku agribisnis laki-laki maupun perempuan terhadap permodalan, sarana dan prasana serta infor-masi pasar.	



CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA DITJEN HORTIKULTURA

Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program/Keg.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/ Keluaran
Terbinanya petani dalam mengadopsi teknologi dan kelembagaan usaha sehingga dapat menjadi petani pengusaha yang berhasil (Program PP 2001-2004: halaman 38)	Rumahtangga petani yang dikepalai perempuan (PKRT) menguasai lahan rata-rata lebih sempit dibanding laki-laki, yaitu 0,7 ha dibanding 1,0 Ha. Namun, produktivitas lahannya lebih tinggi, yaitu 79,8 % dibanding 69,9% (BPS, 2001) Total mmt usaha hortikultura 5,47 juta : sekitar 10 % PKRT, dan hampir separuh-nya adalah perempuan anggota mmt hortikultura berstatus pekerja keluarga. (BPS, 1994)	Akses: Akses PKRT terhadap kredit, iptek, penyuluhan dan pelatihan lebih rendah dibanding LKRT. PKRT yang akses terhadap kelembagaan ekonomi perdesaan sangat rendah Kontrol: Laki-laki memiliki kontrol terhadap sumberdaya lahan/kebun yg lebih tinggi dibanding perempuan. Partisipasi: Anggota kelompok umumnya laki-laki sehingga merekalah yang lebih banyak memperoleh pembinaan Manfaat: Karena petani hortikultura yg terdapat umumnya adalah laki-laki, maka teknologi alat mesin yg dikembangkan cenderung dimanfaatkan oleh petani laki-laki.	Masih kuat-nya Persepsi yang bias gender di kalangan pelaku sana program/ kegiatan: KK rumahtangga petani itu laki-laki dan perempuan berperan di sektor domestik Representasi perempuan dalam usahatani hortikultura rendah, karena data tidak terpilah menurut jenis kelamin.	Fasilitasi pelaku/ pengusaha agribisnis agroindustri berbasis gender untuk meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan mereka	Tersedianya data pengusaha agribisnis/ agroindustri lingkup hortikultura terpilah menurut jenis kelamin serta permasalahan yang mereka hadapi. Meningkatnya jumlah pengusaha agribisnis/ agroindustri lingkup hortikultura baik perempuan maupun pemuda/ i yang berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan Program Pengembangan Sistem Agribisnis Komoditi Hortikultura sehingga mereka akses dan kontrol terhadap sumberdaya agribisnis/ agroindustri yang dapat meningkatkan kinerja usaha dan pendapatan mereka.	Mengumpulkan data profil pelaku agribisnis/ agroindustri lingkup hortikultura terpilah menurut jenis kelamin serta melakukan diskusi kelompok terarah untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan pengusaha agribisnis/ agro-industri tersebut yang terpilah menurut jenis kelamin. Memfasilitasi pengusaha agribisnis/ agro-industri perempuan dan pemuda/ i lingkup hortikultura terhadap sumberdaya agribisnis/ agro-industri seperti bahan baku, informasi pasar, IPTEK, kredit, keanggotaan dalam kelembagaan pertanian seperti KUD, asosiasi pengusaha agribisnis hortikultura lainnya; serta memperoleh pendampingan dalam mengembangkan usahanya.	Buku Profil Statistik dan Kinerja pengusaha agribisnis/ agroindustri komoditas hortikultura di 30 provinsi yang terpilah menurut jenis kelamin Sekitar 30 persen (tergantung kesepakatan) pengusaha agribisnis/ agroindustri perempuan dan pemuda/ i berpartisipasi dan menjadi pemanfaat Program Pengembangan Sistem Agribisnis



CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA DITJEN PERKEBUNAN

Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program/Keg.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/ Keluaran
Meningkatnya produktivitas hingga mencapai 70 persen dari produktivitas potensial Meningkatnya efisiensi usaha perkebunan Meningkatnya penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 600 000 tenaga kerja	Terdapat 22,74 juta rumahtangga pertanian di Indonesia. a. Rumahtangga Usaha Perkebunan. Total : 6,38 juta rmt (29,33 % dari RPI*) P= 80,32% W = 19,68% b. Berdasar komoditinya, - Pekebun Karet sebanyak 975,8 ribu orang, hanya 12,87 % diantaranya pekebun perempuan - Terdapat 861 rumahtangga budidaya kayu-kayuan kehutanan, terdiri atas 3.990.726 anggota rumahtangga, 49 persen diantaranya anggota rumahtangga perempuan.	Akses: Akses PKRT terhadap kredit, iptek, penyuluhan dan pelatihan lebih rendah dibanding LKRT. PKRT yang akses terhadap kelembagaan ekonomi pedesaan sangat rendah Kontrol: Laki-laki memiliki kontrol terhadap sumberdaya kebun lebih tinggi dibanding perempuan Partisipasi: Pekebun laki-laki lebih banyak yang diikutsertakan dalam kegiatan pembinaan	Masih kuatnya Persepsi yang bias gender di kalangan pelaksana program/ kegiatan dalam pembangunan perkebunan (stereotipi KK rumahtangga petani itu laki-laki, sedangkan perempuan berperan di sektor domestik) Representasi perempuan dalam usahatani perkebunan rendah	Fasilitasi usaha agribisnis/ agroindustri yang dikelola laki-laki dan perempuan agar dapat meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan mereka	Tersedianya data pengusaha agribisnis/ agro-industri lingkup perkebunan terpilah menurut jenis kelamin serta permasalahan yang mereka hadapi. Meningkatnya jumlah perencanaan/ pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perkebunan yang mengikuti pelatihan alur kerja analisis gender Meningkatnya jumlah pengusaha agribisnis/ agroindustri lingkup perkebunan baik perempuan maupun pemuda/ yang berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan Program Pengembangan Sistem Agribisnis	Mengumpulkan data profil pelaku agribisnis/ agroindustri lingkup perkebunan terpilah menurut jenis kelamin serta melakukan diskusi kelompok terarah untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan pengusaha agribisnis/ agro-industri tersebut yang terpilah menurut jenis kelamin. Sosialisasi/ Pelatihan Alur Kerja Analisis Gender bagi Perencana/ Pelaksana program/kegiatan pembangunan perkebunan	Buku Profil Statistik dan Kinerja pengusaha agribisnis/ agro-industri komoditas perkebunan di 30 propinsi yang terpilah menurut jenis kelamin Perencana/ pelaksana program/ kegiatan pembangunan perkebunan memahami dan mulai menggunakan alur kerja analisis gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan.



Sasaran Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program/Keg.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/ Keluaran
	c. Terdapat sekitar 107 361 KK peladang berpindah dan perambah hutan (re-settlement) dan 96 249 KK nonre-settlement, namun tidak ada data menurut jenis kelamin. Lengkapi dengan data perencanaan dan pelaksanaan program/proyek/ kegiatan sub-sektor perkebunan yang sudah mengikuti pelatihan orientasi gender bila ada.	Manfaat: Pekebun yang terdata umumnya laki-laki karena itu mereka lebih banyak mendapat manfaat dari program-program pembangunan sub sektor perkebunan.			Komoditas perkebunan sehingga mereka akses dan kontrol terhadap sumberdaya agribisnis/ agroindustri yang dapat Meningkatkan kinerja usaha dan pendapatan mereka.	Memfasilitasi pengusaha agribisnis/agroindustri perempuan dan pemuda/lingkup perkebunan terhadap sumberdaya agribisnis/ agro-industri seperti bahan baku, informasi pasar, IPTEK, kredit, keanggotaan dalam kelembagaan pertanian seperti KUD, asosiasi pengusaha agribisnis perkebunan lainnya; serta memperoleh pendampingan dalam mengembangkan usahanya.	Sekitar 10 persen (tergantung kesepakatan) pengusaha agribisnis/ agroindustri perempuan dan pemuda/i berpartisipasi dan menjadi pemanfaat Program Pengembangan Sistem Agribisnis



CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA DITJEN PERKEBUNAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Sasaran Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/Keluaran
Peningkatan Kemampuan Aparat Sebagai Unsur Pelayanan dan Penciptaan Ketahanan Pangan terutama berkaitan dengan kemampuannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pangan tingkat rumah-tangga, wilayah dan nasional. (Program PP 2001-2004 : hal.50)	Lengkapi dengan: - data rumah tangga petani pekebun (kc.mete, coklat, kelapa sawit atau lainnya) laki-laki dan perempuan. - data petani pekebun yang menangani industri pengolahan hasil perkebunan - data petani pekebun yang memperoleh dukungan dana pengembangan usaha (BLM atau sumber dana lain) - dll	Catatan: analisis kesenjangan diuraikan berdasarkan data pembuka wawasan dan informasi empirik. Contoh: Akses dan kontrol: Akses dan kontrol perempuan dalam rumah tangga perkebunan terhadap berbagai sumberdaya program peningkatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat relatif rendah (perlu dukungan data). Partisipasi: Partisipasi petani pekebun laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan dalam mengikuti program/kegiatan pembangunan perkebunan. Khusus dalam beragam kelembagaan peningkatan ketahanan pangan, partisipasi perempuan dalam rumah tangga pekebun masih sangat rendah (perlu dukungan data). Manfaat: Petani pekebun laki-laki lebih banyak mendapat dukungan dana bantuan usaha dibanding perempuan.	Masih kuatnya Persepsi yang bias gender di kalangan pelaksana program/ proyek /kegiatan dalam pemba-ngunan perkebun-an (stereotipi KK rumah tangga petani itu laki-laki, sedangkan perempuan ber-peran di sektor domestik) Representasi perempuan dalam program-program pengembangan usahatani perkebun-an lebih rendah dibanding laki-laki.	Fasilitasi pelaku usaha agribisnis/ agroindustri berbasis gender	Meningkatnya akses dan kontrol pelaku perempuan dalam membangun agribisnis/ agroindustri subsektor perkebun-an Meningkatnya jumlah perencanaan /pelaksana, program/kegiatan usaha perkebun-an yang mengikuti sosialisasi PUG	Sosialisasi PUG di Pusat dan Daerah Peningkatan kemampuan aparat dalam memahami kebutuhan, aspirasi, pengalaman serta permasalahan petani berdasar perspektif gender.	Terlatihnya Sejumlah Penentu Kebijakan dan fasilitator program/ kegiatan agribisnis perkebunan tentang PUG dalam rangka peningkatan KP Diinkorporasikannya PUG dalam program/ kegiatan agribisnis/ agro industri perkebunan untuk mewujudkan KP

CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA DITJEN PETERNAKAN

Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran Kebijakan/ Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/Ke- luaran
Terwujudnya kelembagaan peternak yang mandiri dan mampu mengakses sendiri faktor produksi dan pelayanannya Meningkat-nya pendapatan peternak hingga melampaui UMR	Total Rmt Usaha Peternakan 5,68 juta atau 26,15 % RPI) Sekitar 7 % nya PKRT Usaha peternakan merupakan usaha keluarga, sehingga baik wanita maupun pria mempunyai akses dalam usaha peternakan kecil maupun besar.	Akses Sekalipun perempuan peternak menjadi pengelola usaha ternak, namun tidak diikutkan dalam kelompok peternak, tidak akses terhadap IPTEK, Kredit maupun kelembagaan peternak Partisipasi Meskipun data yang ada menunjukkan bahwa sebesar 93% pelaku usaha peternakan adalah pria, kenyataannya pelaksanaan kegiatan peternakan seperti ternak kecil (unggas, kambing) dan ternak besar (sapi perah) adalah wanita. Kontrol Kecuali dalam manajemen kandang, wanita kontrol terhadap pemeliharaan dan pemasaran ternak pada tingkat rumah tangga, Manfaat Karena terbatasnya akses terhadap sumberdaya, iptek, informasi, serta fasilitas pelayanan dalam rangka pembangunan, maka wanita peternak hanya sedikit memperoleh manfaat dari program pembangunan peternakan.	- Adanya asumsi bahwa KK rumah tangga peternak pria adalah pria menyebabkan tidak adanya pengakuan terhadap WKRT sebagai peternak - Akibat dari asumsi butir 1 di atas, wanita peternak WKRT dan anggota rumah tangga peternak tidak mendapat fasilitas subsidi (ternak, pakan ternak), kredit, penyuluhan dan pelatihan. - Akibat asumsi pada butir 1 di atas, wanita peternak diabaikan dalam pembentukan kelompok peternak, sehingga semua kegiatan pembinaan program pembangunan peternakan selalu ditujukan pada kelompok tani ternak yg umumnya beranggota pria.	Peningkatan sumber-sumber informasi, teknologi, kredit, dan kelembagaan peternak yang melayani laki-laki/ perempuan Peningkatan partisipasi perempuan peternak sebagai pengambil keputusan dalam usaha peternakan, sehingga dengan meningkatnya partisipasi tersebut maka diharapkan adanya pengakuan terhadap adanya pengakuan thdp PKRT peternak	Meningkat-nya proses pelatihan dan sosialisasi tentang gender. Melibatkan PKRT dan LKRT dalam setiap kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan.	Melakukan proses pelatihan dan sosialisasi tentang gender. Melibatkan PKRT dan LKRT dalam setiap kegiatan sosialisasi ataupun pelatihan	Prinsip-prinsip gender agar diterapkan dalam kebijakan Ditjen Peternakan baik dalam pedum, Renstra dan peraturan-peraturan dan kebijakan lainnya.



CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA DITJEN PETERNAKAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Sasaran Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/Keluaran
Timbulnya rasa aman masyarakat dengan terbatasnya dari PHM yang utama. Terbentuknya usaha perbibitan temak rakyat baik milik peternak laki-laki perempuan. Tersedianya sarana produksi penting seperti semen beku dan vaksin bagi peternak laki-laki maupun perempuan.	Situasi penyakit hewan di Indonesia tahun 2002 dengan jumlah kasus Anthrax 1 kasus, Brucellosis 1.348 kasus, BVD 867 kasus, Hog cholera 1.984 kasus, Jembrana 183 kasus, Salmonellosis 5.223 kasus, IBD 10.298 kasus, ND 492.660 kasus, IBR 53 kasus, Rabies 653 kasus, SE 1.406 kasus. Tersedianya SDM 2002: Inseminator 3.527, PPL 4.150 PPS 324, Drh 257, Paravet 454. Tersedianya sarana Pos keswan 484. Lab keswan: - BPPV 7 - Lab B 27 - Lab C 88 Lab Kesnavet 17	Akses Sekalipun terdapat tenaga medis dan SDM peternakan perempuan, namun jarang diterima menjadi tenaga medis di lapangan. Partisipasi Meskipun pelaku medis dan SDM peternakan banyak perempuan, namun kenyataannya pelaksanaan kegiatan peternakan di lapangan adalah pria. Kontrol Dalam manajemen lapangan yang banyak adalah laki-laki Manfaat Karena terbatasnya akses terhadap kegiatan peternakan di lapangan, maka tenaga medis perempuan hanya sedikit memperoleh manfaat dari program pembangunan peternakan.	Masih kuatnya persepsi bias gender di kalangan pelaksana kegiatan pembangunan peternakan, dimana tenaga laki-laki lebih banyak berperan dibandingkan perempuan. Representasi perempuan dalam melaksanakan program-program pengembangan peternakan dan penggunaan sarana produksi lebih rendah dibandingkan laki-laki.	Dibukanya peluang akses dan kontrol untuk pelaku medis dan SDM baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mereka mempunyai kesetaraan dalam akses dan kontrol. Agar partisipasi pelaku medis dan SDM perempuan meningkat dalam pembangunan peternakan. Menfasilitasi pelaku medis dan SDM peternakan berbasis gender.	Meningkatnya sumber-sumber informasi, teknologi dan kesempatan kerja bagi pelaku medis dan SDM perempuan dalam pembangunan peternakan.	Melakukan proses pelatihan dan sosialisasi tentang gender. Melibatkan tenaga medis dan SDM dalam pembangunan peternakan.	Prinsip-prinsip gender agar diterapkan dalam kebijakan Dijen Peternakan baik dalam pedum, Renstra dan peraturan-peraturan dan kebijakan lainnya.



CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/Keluaran
Menurunnya kehilangan hasil panen rata-rata 3 persen per tahun Berkembangnya usaha bisnis dan kemitraan usaha bidang pangan Catatan : Sebaiknya mengacu RENSTRA BPHP	Perempuan pengusaha hanya 33%. Peran perempuan dalam usaha industri kecil dan kerajinan rumah tangga (IKKR) sekitar 40% dari 2,19 juta . Dari 40 % IKKR yang dikelola Perempuan pekerjaannya didominasi pekerja laki-laki (71,1 %) dari 5,3 juta pekerja. Dari sekitar 4 juta orang pekerja di industri pengolahan besar dan sedang yang berbadan hukum, sekitar 1,4 juta diantaranya adalah perempuan, Jumlah pekerja perempuan di lapangan usaha industri pengolahan, besar dan sedang lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun di bagian produksi lebih banyak perempuan. Sekitar 44,3 % dari usaha industri IKRT dikelola oleh perempuan, sedangkan pada industri kecil (IK) hanya 10,3 %. Persentase perempuan pada IKRT yang berpendidikan SMA ke atas jauh lebih rendah daripada laki-laki. (Perempuan 5 %, Laki-laki 10,9 %) (BPS, 2000)	Akses : Perempuan pelaku bisnis pangan kurang memiliki akses terhadap sumber permodalan dari lembaga keuangan formal Output rata-rata usaha perempuan jauh lebih rendah dibanding usaha yang dikelola laki-laki (27%) Akses perolehan modal usaha bersifat tradisional atau warisan dari orangtua (modal sendiri). Kontrol : Status bekerja perempuan yang tidak dibayar masih tinggi (89%) Partisipasi: Pekerja laki-laki mendominasi usaha industri kecil dan kerajinan meskipun pemilik usahanya adalah perempuan. Manfaat: Pekerja dalam usaha industri kecil dan kerajinan umumnya laki-laki meskipun pemiliknya adalah perempuan. Sementara itu, kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan pengolahan umumnya diikuti oleh peserta perempuan.	1. Persepsi umum memandang bahwa laki-laki adalah pelaku usaha dalam keluarga dan wanita hanya sebagai tenaga tambahan. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan terhadap wanita sebagai pelaku usaha pengolahan produk pertanian. 2. Akibat dari butir 1 diatas, wanita tidak dilibatkan dalam program pembinaan mutu produk Pertanian	Peningkatan akses pelaku agribisnis (pengusaha pengolahan) terhadap permodalan, sarana dan prasarana agribisnis beserta informasi pasar.	Meningkatnya jumlah dan layanan penyedia input pertanian, lembaga jasa, alat dan mesin pertanian (alsintan) yang responsif gender. Jumlah perempuan pelaku agribisnis yang akses dan kontrol terhadap permodalan, sarana dan prasarana agribisnis beserta informasi pasar bertambah 25%	Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) baik melalui media cetak, elektronik maupun internet untuk pasar dalam dan luar negeri yang juga menjangkau pengusaha UMKM perempuan yang mengelola industri pengolahan pertanian. Pelatihan Petugas PIP Propinsi dan Kabupaten tentang gender dalam UMKM. industri pengolahan pertanian.	Terlatihnya: • 120 orang Petugas PIP Propinsi • 200 orang Petugas PIP Kabupaten • Kelengkapan Sarana Propinsi dan Kabupaten Dari 120 orang Petugas PIP Tingkat Propinsi dan 200 orang Petugas PIP Kabupaten memberikan pelayanan jasa kepada pengusaha UMKM Perempuan. Semua Petugas PIP Tingkat Propinsi dan Kabupaten mulai sensitif terhadap pengalaman, aspirasi dan kebutuhan pelaku agribisnis laki-laki dan perempuan (sadar atau responsif gender)



CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA BADAN LITBANG PERTANIAN

Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran Kebijakan/ Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/ Keluaran
Meningkatnya hasil penelitian terobosan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi agribisnis. Meningkatnya rekayasa teknologi dalam rangka optimalisasi sumberdaya pertanian.	Data 1994 jumlah pegawai Badan Litbang Pertanian sebanyak 6987 orang, hanya 22,13% perempuan. Menurut tingkat pendidikan, hanya 0,33% bergelar doktor, 2,42 % S2 dan 6,6 % S1; sementara laki-lakinya berturut-turut 2,93 % S-3, 6,56 % S-2 dan 15,27 % S-1. Proporsi penelitiannya, dari 1960 orang, perempuannya hanya 27,85 %. Mereka yang tergolong APU, AP Madya dan AP Muda berturut-turut sebesar yaitu 0,1 %, 0,05 % dan 0,20; sementara laki-lakinya berturut-turut 1,68 %, 0,87 % dan 1,48 %.	Akses : Masih rendahnya jumlah pe neliti/ penyuluh/ pengkaji teknologi pertanian yang menjalankan tupoksi yang responsif gender. Kontrol : Pada level Eselon 1 dan 2 hanya ada 2 % perempuan. Sebagian besar jabatan struktural di dominasi laki-laki. Partisipasi: Jumlah penyuluh dan peneliti perempuan yang mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi lebih sedikit dibanding laki-laki.	Masih rendahnya tingkat kesadaran penentu kebijakan dan peneliti/ penyuluh bahwa pelaku pembangunan pertanian terdiri atas laki-laki dan perempuan (netral gender) dan bersifat spesifik lokal; karenanya : a. Penelitian/ pengkajian yang dihasilkan belum berorientasi pada potensi, masalah, kebutuhan, pengalamanan, dan kepentingan pelaku pembangunan pertanian, laki-laki dan perempuan .	Mengintegrasikan sensitivitas gender dalam Penelitian/ pengkajian di kalangan penentu kebijakan, peneliti dan penyuluh . Mengupayakan pengumpulan data gender dalam Penelitian/ pengkajian yang terpilah menurut jenis kelamin.	Meningkatnya jumlah penentu kebijakan, peneliti dan penyuluh yang sadar gender dalam peneliran/ pengkajian Tersusunnya data pengguna iptek terpilah menurut jenis kelamin. Meningkatnya jumlah teknologi strategis dan spesifik lokasi , ramah lingkungan dan sensitif gender.	Sosialisasi dan advokasi dalam bentuk loka karya, seminar, <i>roundtable meeting</i> dan produksi media informasi tentang inkorporasi PUG dalam Penelitian/ pengkajian. Mengumpulkan data profil potensi, masalah, kebutuhan, pengalaman, kepen-tingan pelaku/ pemanfaat iptek hasil-hasil Penelitian/pengkajian.	Tersosialisasi-kan nya konsep gender dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan penelitian/ pengkajian di kalangan Eselon I, eselon II, petugas rencana, dan pelaksana kegiatan di jajaran litbang.

Sasaran Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/Keluaran
Meningkatnya paket dan penerapan teknologi spesifik lokasi. (Buku Program Pembangunan Pertanian 2001-2004, hal 45)	Dewasa ini bahwa jumlah peneliti di lingkungan BPTP/ LPTP sekitar 2500 orang (Juli,1996) (belum ada data berdasarkan jenis kelamin) Data BPS 1998 menyebutkan bahwa secara umum hanya ada seorang perempuan di antara : (a) setiap 9 pejabat Eselon I dan 2 ; (b) dari setiap 14 pejabat Eselon 3 ; (c) dari masing-masing 8 pejabat 4 dan 5 (BPS,1998)	Manfaat: Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyuluh dan peneliti lingkup Deptan memperoleh imbalan gaji serta honor sesuai dengan pekerjaannya, serta memperoleh kesempatan pelatihan dan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan bagi pengembangan karir mereka.	b. belum tersedianya data pengguna pemanfaat/penelitian/ pengkajian yang terpilah menurut jenis kelamin dan spesifik lokal.	Meningkatkan penyediaan teknologi strategis dan spesifik lokasi, ramah lingkungan dan sensitif gender		Melakukan penelitian/ pengkajian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan teknologi strategis dan spesifik lokasi, ramah lingkungan dan sensitif gender	



PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Isu/Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan Operasional	Sasaran/Keluaran
Pengembangan kewirausahaan (entrepreneurship) sehingga menjadi pelaku agribisnis yang handal/tangguh. (Pro'ram PP 2001-2004: hal 42)	Jumlah penyuluh pertanian Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 26.202 orang (Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2002). Selama ini, BPSDMP relatif belum mempunyai data terpilah menurut jenis kelamin, baik untuk aparat, termasuk penyuluh pertanian, maupun pelaku agribisnis. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga tani pada umumnya sangat rendah, terutama pendidikan perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT), hanya sekitar 7% yang berpendidikan SLTP keatas (BPS, 2001). Rumah tangga petani yang dikepalai perempuan (PKRT) menguasai lahan rata-rata lebih sempit dibanding laki-laki, yaitu 0,7 Ha dibanding 1,0 Ha. Namun produktivitas lahannya lebih tinggi, yaitu 79,8% dibanding 69,9% (BPS, 2001)	Akses : Perempuan mempunyai akses lebih kecil untuk di-rekrut sbg penyuluh pertanian di tingkat lapang. Hal ini tercermin dari perbandingan jumlah penyuluh pertanian perempuan dan laki-laki non sarjana di Bali masing-masing sebesar 7,14% dan 75,61% (Suprpto). Dalam hal ini, penyuluh pertanian non sarjana ditempatkan di tingkat lapang dan penyuluh pertanian sarjana ditempatkan di kabupaten. Pendekatan pembangunan pertanian yang memposisikan kepala keluarga (yg sebagian besar laki-laki) merupakan pencerminan dari persepsi penentu kebijakan/perencana/fasilitator pembangunan bahwa kegiatan pengembangan agribisnis berada di ranah publik yang dianggap sbg domain laki-laki. Oleh karena itu, perempuan relatif belum akses terhadap kegiatan penyuluhan pertanian (Sulaiman, 1998). PKRT yang akses terhadap kelemahan ekonomi pedesaan sangat rendah.	Masih kuatnya persepsi yang bias gender di kalangan penentu kebijakan dan fasilitator program/proyek/kegiatan bahwa KK mmt petani adalah laki-laki dan perempuan umumnya berperan di sektor domestik menyebabkan PKRT pada RPI relatif tidak diperhitungkan keberadaannya. Pengakuan terhadap peran perempuan dan generasi muda pada RPI tidak diikuti dengan pemberian kesempatan untuk mengambil keputusan/berpendapat dan untuk meningkatkan pengetahuan/keberhasilan sesuai dengan aspirasinya. Kebutuhan pelaku agribisnis bersifat lokal spesifik dan tidak selalu netral gender.	Fasilitasi petani/pelaku agribisnis/agroindustri berbasis gender untuk meningkatkan kinerja, produktivitas dan pendapatan mtk. Pemberdayaan dan mmt petani yg berada di bawah garis kemiskinan.	Meningkatnya jumlah penentu kebijakan, perencana dan penyelenggara program/proyek/kegiatan pengembangan SDM pertanian yg sensitif gender. Tersedianya data petani/pelaku agribisnis/agroindustri terpilah menurut jenis kelamin. Meningkatnya jumlah petani/pelaku agribisnis perempuan maupun pemuda/i yang berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari program/proyek/kegiatan pembangunan pertanian.	Peningkatan pemahaman gender dalam pengembangan SDM pertanian di kalangan penentu kebijakan, perencana dan penyelenggara program/proyek/kegiatan pengembangan SDM pertanian melalui sosialisasi dan advokasi dalam bentuk lokakarya, seminar, roundtable meeting, pelatihan dan produksi media informasi ttg inkorporasi PUG dalam program/kegiatan pengembangan agribisnis melalui pengembangan SDM. Melakukan analisis gender dan karakterisasi mengenai profil potensi, pengalaman, masalah, kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan (tua dan muda) pelaku/pemanfaat program/proyek pengembangan agribisnis melalui pengembangan SDM pertanian.	Diterapkannya PUG ke dalam kebijakan/perencanaan, implementasi program/proyek/kegiatan pengembangan SDM. Berkembangnya kelompok-kelompok usaha agribisnis/agroindustri yg responsif gender.

Sasaran Kebijakan/ Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Isu/ Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan Operasional	Sasaran/ Keluaran
	Terdapat 21,74 jt rmt pertanian Indonesia (RPI): Rmt Padi dan palawija 18,09 jt (83,24% dari total RPI) tapi tidak ada data menurut jenis kela-min. (BPS, 1994) Total rmt usaha hortikultura 5,47 juta: sekitar 10% PKRT dan hampir separuhnya adalah perempuan anggota rmt berstatus pekerja keluarga (BPS, 1994) Total rmt usaha peternakan adalah 5,68 juta rmt (26,15% dari RPI). Terdapat 7% diantarnya PKRT. (BPS, 1994) Data mengenai partisipasi penyuluhan pertanian yang terpilah menurut jenis kelamin hanya dilaporkan dari 2 provinsi, yaitu Bali dan Riau pada tahun 1994 (Suprpto, 1994). Partisipasi perempuan dalam penyuluhan pertanian masih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu berturut-turut sebesar 14,26% dan 9,23% di Riau dan Bali.	Kontrol : Meskipun peran perempuan pada RPI diakui keberada-annya namun adanya ang-gapan bahwa peran perem-puan adalah sebagai "pen-damping" atau usahanya di-anggap sbg usaha samping an, maka laki-laki cende-rung berperan sebagai pe-nentu/ pengambil keputusan dalam RPI. Dewasa ini sebagian besar penentu kebijakan, peren cana, fasilitator pro-gram/ kegiatan pengembangan SDM pertanian adalah laki-laki dan sebagian besar relatif belum sensitif gender. Partisipasi: Meskipun jumlah perempu-an petani yg diikutkan dlm program/kegiatan se-makin meningkat, namun materi yang disampaikan pd mereka cenderung belum mengacu kepada penga-laman, kebutuhan, dan aspirasi mrk. Belum banyak pemuda tani yang dii-kutsertakan dalam program/kegiatan pembangunan pertanian. Manfaat: Oleh karena PUG belum diinkor-porasikan ke dlm pro gram/kegiatan pengembangan SDM perta-nian, maka pelaku agribisnis perempuan dan generasi muda relatif blm mem-pero-leh manfaat langsung dari hasil program/kegiatan pengembangan agribis nis melalui pengembangan SDM pertanian.	Representasi perem-puan dalam agribisnis pada data yang ada sangat rendah. Hal ini disebabkan karena data yang ada tidak terpilah menurut jenis kelamin.			Penyelenggaraan pro-gram/ proyek/ kegiat-an pengem-bangan kewirausahaan (entre preneurship) melalui pengembangan SDM pertanian yang sensi-tif gender. Pengumpulan data petani/pelaku agribis- nis/ agroindustri yg terpilah menurut jenis kelamin serta melaku kan diskusi kelom-pok terarah (FGD) untuk memperoleh informa-si mengenai perma-salahan, kebutuhan, pengalaman, dan aspi rasi petani/ pelaku agribisnis. Memfasilitasi petani /pelaku agribisnis/ agroindustri perem-puan dan pemuda/i agar akses thdp sumber-daya agribis-nis/agroin-dustri spt bahan baku, informa-si pasar, IPTEK, kre- dit, keanggotaan dlm kelembagaan pertani-an seperti KUD, aso-siasi pengusaha agri- bisnis lain nya, serta memperoleh pen-dam-pingan dlm mengem-bangkan usahanya.	



CONTOH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA BADAN KETAHANAN PANGAN

Program Ketahanan Pangan

Sasaran Kebijakan/ Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program//Keg.	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/ Keluaran
Terbangun nya Sistem Ketahanan Pangan yang menjamin Ketahanan Pangan Nasional, Regional dan Rumah tangga antarwaktu Meningkat nya Tingkat Diversifikasi Masyarakat dan Menurunnya ketergantungan terhadap beras Menurunnya tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat (Program PP 2001-2004, hal- man 50)	Tahun 1999 rumahtangga miskin (rapuh ketahanan pangan) ter-dapat 18,2 % di Indonesia atau 20,2% di desa dan 15,2 % di kota (Irawan, 2000) Sejumlah 51,1 % rmt mengalami defisit konsumsi (Latief dkk., 2000). Pada tahun 1999 sekitar 25% (5 juta) anak balita menderita gizi kurang dan 7,8 % (1,6 juta) anak balita menderita gizi buruk. Prevalensi gizi kurang pada usia bayi setelah pemberian ASI Eksklusif (lebih besar dari 4 bulan) lebih tinggi dibanding pada usia sebelum 4 bulan) <i>Lengkapi dengan data kelompok tani lumbung, kelompok perempuan petani yang diikuti sertakan dalam proyek DPG, proyek pemanfaatan pekarangan, lumbung dll bila ada</i>	Akses: Anak-anak memiliki akses yang rendah terhadap pangan bergizi. Perempuan pada keluarga miskin lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja sehingga memiliki akses yang rendah informasi tentang pangan bergizi Kontrol : Pada tingkat rumahtangga, laki-laki yang melakukan kontrol terhadap distribusi pangan dalam rumahtangga Partisipasi: Laki-laki di kalangan keluarga miskin tidak dilibatkan dalam kegiatan peningkatan pangan gizi dan keluarga seperti DPG, UPGK, dll Manfaat: Petani perempuan telah banyak memperoleh manfaat dari nemagai program peningkatan gizi keluarga namun belum dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya karena keterbatasannya dalam mengambil keputusan di tingkat keluarga.	Pada beberapa budaya di Indonesia, dalam Rumahtangga Petani/pedesaan secara de yure laki-laki sebagai kepala keluarga, dominan dalam mengontrol alokasi ekonomi termasuk untuk pangan. Adanya budaya yang mengedepankan suami dan anak laki-laki untuk mengkonsumsi pangan yang bermutu dibanding perempuan dan anak perempuan Kuatnya persepsi di kalangan perencana dan pelaksanaan program/ proyek/kegiatan yang memandang bahwa masalah gizi dan pangan adalah urusan repro-duktif (domain perempuan), sehingga laki-laki tidak tersentuh dalam program gizi keluarga. Sebaliknya dalam program Lumbung Pangan karena dipandang sebagai domain publik, laki-laki dominan dilibatkan dalam program tersebut.	Penerapan PUG dalam meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat	Meningkatnya peran perempuan dan kelompok PKK dalam peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat	Pengembangan peran faatan pekarangan Pemberdayaan masyarakat dan gender di wilayah lahan kering (PIDRA) Pengembangan model pemberdayaan perempuan mendukung ketahanan pangan	Berkembangnya pengendalian karagaman produksi dan konsumsi Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun Mandirinya usaha masyarakat dan gender di wilayah kering Tersedianya model dan pedoman umum pemberdayaan perempuan mendukung ketahanan pangan

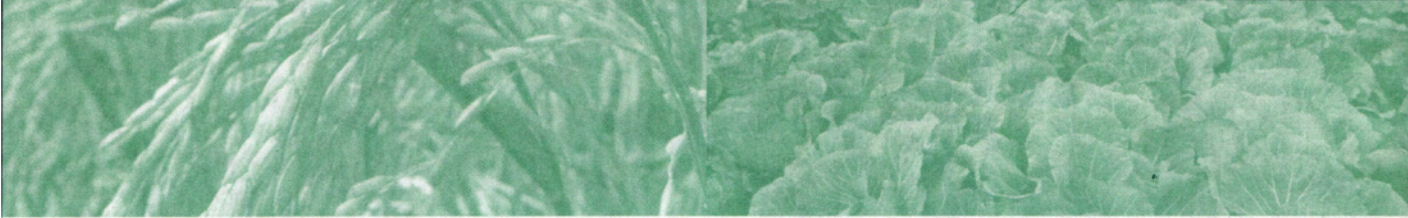


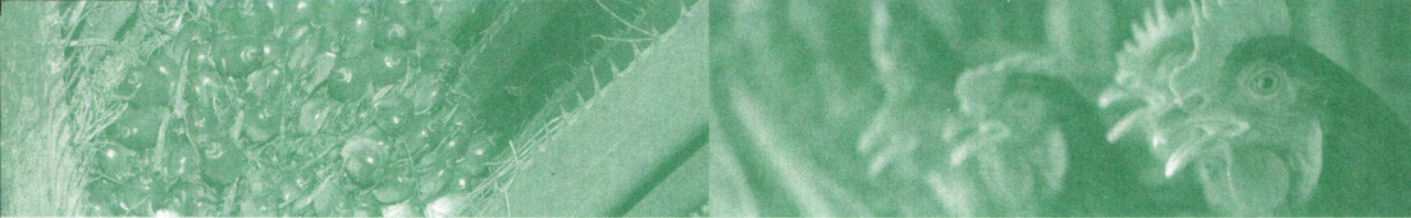
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA INSPEKTORAT JENDERAL

Program Pengembangan Agribisnis

Sasaran Kebijakan/ Program /Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Kesenjangan Gender	Isu/ Masalah Gender	Reformulasi Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Aksi	Sasaran/keluaran
Berkembangnya semua sistem secara serasi dan seimbang (Program PP 2001-2004 hal-man 34)	Jumlah pemeriksa laki-laki% Jumlah pemeriksa perempuan% Jumlah pemeriksa yang telah mengikuti training tentang PUG; laki-laki.....orang, perempuan Jumlah kegiatan yang diperiksa yang mengintegrasikan gender dalam kegiatannya.	Akses : Meskipun jumlah pemeriksa laki-laki lebih besar dari perempuan, kesempatan untuk memeriksa sama. Namun kesempatan laki-laki untuk menjadi pemeriksa cenderung lebih terbuka untuk laki-laki. Kontrol : Karena jumlah pemeriksa laki-laki lebih besar dari pemeriksa perempuan, segala keputusan lebih didominasi oleh laki-laki.	Masih kuatnya Persepsi di kalangan pemeriksa laporan program/ kegiatan yang lebih terfokus pada pencapaian target yang berorientasi pada fisik, belum pada SDM yang berbasis gender. Belum tersosialisasi implementasi konsep dan alur kerja analisis gender di sektor pertanian di kalangan pemeriksa	Memfasilitasi para pemeriksa laporan program /kegiatan untuk memahami pentingnya konsep dan alur kerja analisis gender dalam pembangunan pertanian	Meningkatnya jumlah pemeriksa laporan program / kegiatan yang memahami konsep dan alur kerja analisis gender dalam laporan-laporan pelaksanaan, program/kegiatan di subsektor pertanian.	Sosialisasi konsep dan alur kerja analisis gender di kalangan pemeriksa laporan program/kegiatan Menyusun Pedoman Umum Bagi Pemeriksa Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian tentang penerapan konsep dan alur kerja analisis gender	Sekitar 30 persen (tergantung kesepakatan) pemeriksa laporan program/ kegiatan memahami pentingnya konsep dan alur kerja analisis gender dalam laporan-laporan pelaksanaan, program/ kegiatan di subsektor pertanian.



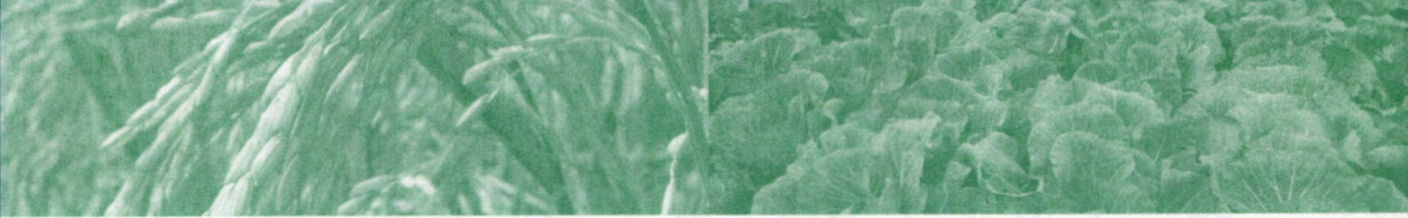




DAFTAR PUSTAKA

1. BAPPENAS, 2001. Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan. BAPPENAS bekerjasama dengan Proyek WSP II-CIDA, Jakarta.
2. Departemen Pertanian, 2005. Rencana Pembangunan Pertanian 2005-2009. Biro Perencanaan dan Keuangan. Departemen Pertanian, Jakarta.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2002. Panduan Pelaksanaan INPRES Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Pertanian.
4. Departemen Pertanian, 2003. Draft Rencana Pembangunan Tahun 2004. Jakarta





TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Mappaona, MS
Koordinator : Dr. Ir. Abdul Basit
Tim Penulis : Ir. Pamela Fadhilah, MA
Ir. Cut Ratna
Ir. Siti Sugiah Machfud Mugniesyah, MS
Dr. Ir. Fawzia Sulaiman, MS





